

Volume 9 Nomor 3 Desember 2024

E-ISSN 2541-0938 P-ISSN 2657-1528

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI
JURKAMI

JURKAMI

**VOLUME 9
NOMOR 3**

**SINTANG
DESEMBER
2024**

**DOI
10.31932**

**E-ISSN
2541-0938
P-ISSN
2657-1528**

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

Donny Setiagama[✉], Yunita Astikawati², Emilia Dewiwati Pelipa³

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Indonesia¹

STKIP Persada Khatulistiwa, Indonesia^{2,3}

✉ Corresponding Author Email: donnysetiagama99@gmail.com

Author Email : yunitaakun@gmail.com² , pelipaemilia@gmail.com³

Abstract:

Recording state financial information is a manifestation of transparency and responsibility in state financial management. The aim of this research is to find out how Government Accounting Standards are implemented in the Sintang Regency Government. The research data used is primary data collected using the interview method with the Head of Accounting at the Sintang Regency BPKAD office. The data in this research is data on the implementation of SAP in Sintang Regency. These data were collected by interviewing the Head of Accounting at the Sintang Regency BPKAD Agency Office. The implementation of SAP in the Sintang Regency Government begins with writing, classifying and publicizing the government's financial transactions in managing its budget. The implementation of SAP carried out by the Sintang Regency BPKAD Accounting Division is in accordance with accounting standards and other accounting policy regulations. The Sintang Regency BPKAD Accounting Sector uses policies issued by BPK-RI and the Indonesian Ministry of Finance to overcome financial reporting problems of the Sintang Regency Regional Government. The implementation of SAP in Sintang Regency has been implemented well and according to valid regulations.

Abstrak:

Pencatatan informasi keuangan negara adalah perwujudan dari transparansi dan responibilitas penataan keuangan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Sintang. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi di kantor BPKAD Kabupaten Sintang. Data pada penelitian ini merupakan data penerapan SAP pada Kabupaten Sintang. Data-data ini dikumpulkan dengan wawancara terhadap Kepala Bidang Akuntansi di Kantor Badan BPKAD Kabupaten Sintang. Penerapan SAP di Pemerintah Kabupaten Sintang dimulai dengan penulisan, penggolongan, dan publisitas terhadap transaksi keuangan pemerintah dalam mengelola anggarannya. Penerapan SAP yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sintang sudah sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi kebijakan akuntansi lainnya. Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sintang menggunakan kebijakan-Kebijakan yang dikeluarkan oleh BPK-RI dan KEMENKEU RI untuk mengatasi masalah pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Penerapan SAP di Kabupaten Sintang sudah diterapkan secara baik serta sesuai aturan yang valid

Article History:

Received: July 2024

Revision: October
2024

Accepted: October
2024

Published: December
2024

Keywords:

Application, Standards
Accounting,
Financial, Governance

Sejarah Artikel

Diterima: Juli 2024

Direvisi: Oktober 2024

Disetujui: Oktober
2024

Diterbitkan: Desember
2024

Kata kunci:

Penerapan, Standar
Akuntansi, Keuangan,
Governance.



How to Cite: Donny Setiagama, Yunita Astikawati, Emilia Dewiwati Pelipa. 2024. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kabupaten Sintang*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), 9 (3) DOI : 10.31932/jpe.v9i3.3674



PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual (Susliyanti, 2021). Peraturan ini diturunkan dari pemerintah pusat ke daerah dan wajib melakukan pelaporan sesuai standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah melaksanakan pembuatan berita informasi keuangan yang bermutu tinggi tentunya merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah. Informasi berita keuangan harus menggambarkan pengelolaan informasi keuangan pemda yang bagus dan relevan, meliputi pembuatan yang mengacu pada regulasi administrasi yang sah serta aturan norma yang berlaku.

Nilai keberhasilan dari suatu laporan keuangan serta mutunya tentu harus dilakukan pemeriksaan, analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktadan menghasilkan opini yang ditetapkan oleh BPK yang berhubungan dengan informasi keuangan pemerintah daerah. Opini WTP adalah strata dari mutu informasi keuangan oleh BPK buat menyatakan laporan keuangan sudah sesuai menggunakan standar yang berlaku dan telah disahkan.

Standar akuntansi pemerintah adalah suatu metode akuntansi yang diterapkan pada pembentukan serta penyampaian informasi keuangan negara. Standar akuntansi pemerintahan artinya kondisi yang diharapkan pada kemajuan

kualitas informasi keuangan negara. Laporan keuangan harus berkualitas dan informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material (Ariyanto, 2020).

Pada pelaksanaan tugas pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu publik harus sudah menghasilkan sistem penanggulangan masalah intern yang mesti dilakukan baik di taraf pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Pengendalian internal sangat penting dilakukan dipemerintahan daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari: (1) penilaian resiko, (2) lingkungan pengendalian, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pengawasan pengendalian intern (Ridzal *et al.*, 2022). Pengendalian internal ini merupakan salah satu factor yang penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh pemerintah daerah agar hasil pengolahannya menjadi wajar dan berguna bagi banyak pihak. Informasi berita keuangan publik adalah berita yang berguna bagi pemakai informasi. buat membentuk berita yang berkualitas baik, sebuah organisasi wajib memiliki Sistem berita yang baik. Sistem berita digunakan untuk memaksimalkan akuntabilitas dan tranparansi.

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat (Jatmiko, 2020). Semua ini dilakukan untuk mewujudkan tanggung jawab kepada *public*. Menurut Mardiasmo dalam Julianti (2023) Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah



(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Informasi berita keuangan mempunyai fungsi untuk golongan yang menggunakannya.

Oleh karena perihal tersebut informasi berita keuangan wajib mempunyai mutu dan keunggulan yang bagus serta pula bisa dipergunakan menjadi sarana untuk menentukan putusan kesimpulan kepada kelompok pengambil keputusan (Peraturan Pemerintah Nomor 71. 2010). Ada beberapa faktor yang menentukan informasi berita keuangan yang sebagai kondisi supaya informasi berita keuangan sangat bermutu bagus, yaitu:

1. Sesuai

Laporan informasi keuangan yang sesuai bila mempunyai berita yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Berita yang relevan meliputi beberapa hal berikut:

- a. ada berita informasi berwujud nilai umpan balik.
- b. ada berita yang bernilaian produktif.
- c. berita yang tersaji benar periode.
- d. berita yang tersaji tersedia secara menyeluruh.

2. Tangguh

Berita yang ada pada sebuah laporan keuangan tak mempunyai berita yang bisa menyesatkan serta terhindar berasal keliru saji material, setiap berita tersaji menggunakan wasiat, serta bisa

diverifikasi. berita yang tangguh wajib mempunyai ciri sebagaimana halnya:

- a. Berita tersaji secara amanah.
 - b. Berita pada laporan akhir informasi keuangan bersifat verifiability.
 - c. Berita berwujud objektif.
3. Bisa jadi instrumen perbandingan
- Berita yang ada di sebuah laporan keuangan wajib bisa dibandingkan menggunakan laporan keuangan di periode sebelumnya.
4. Bisa dipahami
- Berita yang disajikan di laporan keuangan simpel buat dipahami juga dimengerti bagi pihak pengguna laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan ini menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sehingga bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan serta dapat dijadikan acuan bagi satuan kerja (Aminy *et al.*, 2021)

Kriteria yang wajib harus dimiliki atas laporan keuangan supaya bisa dikatakan berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 antara lain merupakan relevan, tangguh, bisa dijadikan alat perbandingan, dan bisa dipahami. supaya informasi keuangan sinkron menggunakan acuan tadi, maka dibuatlah Standar Akuntansi Pemerintahan yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, lalu dimutakhirkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Reaksi penelitian yang dulu menerangkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Standar Akuntansi pemerintahan memiliki dampak yang baik serta relevan tentang hubungan dengan tingkat keunggulan laporan keuangan. Laporan



informasi keuangan yang sinkron menggunakan standar akuntansi pemerintahan, melaksanakan tata kelola taksiran keuangan pemerintah pula wajib dilakukan dan harus sinkron menggunakan sistem penyelenggaraan internal yang kompatibel. Hal ini senada dengan pendapat Yulyanto dan Kiswanto (2020) kejelasan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka bisa membentuk laporan keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi pada laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibatnya laporan yang terjadi berkualitas. Namun Hanukh et al (2020) menyatakan walaupun jumlah pegawai, sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi (TI) berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang memadai namun belum optimal.

Alterasi penelitian ini serta penelitian terdahulu adalah untuk pengkaji mengambil informasi mengenai implikasi SAP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Mengingat adanya pergantian pejabat yaitu Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Sintang. Oleh karena hal tersebut, perbedaan kualitas SDM dari Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Sintang juga berbeda. Pada pergantian tersebut, Pejabat Daerah yang memimpin Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sintang kemungkinan besar terdapat perbedaan skill dalam pengungkapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang walaupun Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan sama.

Kemajuan kapabilitas informasi data keuangan Pemkab Sintang harus membagikan tentang pelaksanaan prosedur taksiran telah dilaksanakan

menggunakan aturan yang baku dan menandakan bahwa informasi keuangan daerah telah dibentuk sinkron menggunakan SAP. Selaras dengan klasifikasi tersebut, pengkaji sangat ingin menggunakan reaksi pendapat badan pemeriksa keuangan mengenai laporan keuangan Pemkab Sintang. Dengan terbitnya opini wajar tanpa pengecualian, memotivasi pengkaji untuk menganalisis tentang penerapan SAP pada pemda Kabupaten Sintang maka berasal dari perihal tersebut, pengkaji mengusahakan penelitian menggunakan isu "Analisis Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Sintang " sebagai judul penelitian. Penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana SAP pada Pemkab Sintang pada perihal I pengungkapannya sesuai standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian kualitatif berbentuk kata, kalimat, narasi maupun gambar (Ramhdan, 2021). Penelitian bersifat field research yang dilaksanakan di BPKAD Pemerintah Kabupaten Sintang. Penelitian saat ini memakai hegemoni minimum. Perihal tersebut ditimbulkan sebab pengkaji tak mempunyai kemampuan mensugesti korelasi mengiringi komponen penelitian ini. Ketentuan periode masa dipenelitian saat ini merupakan penelitian lintas sektoral yakni seluruh informasi dihimpun pada saat eksklusif pada perihal dalam rangka wawancara yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Sintang menggunakan BPKAD menjadi segmen penelitian tersebut. Kabid Akuntansi BPKAD serta staf bagian akuntansi bertindak sebagai narasumber pada penelitian saat ini. Informasi data yang diperlukan adalah informasi data bersangkutan dengan berafiliasi menetapkan implikasi standar akuntansi



pemerintahan, sistem penanganan intern, serta kualitas publikasi keuangan daerah. Informasi diatas dihimpun menggunakan metode mewawancarai masing-masing responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah asas – asas akuntansi yang dilakukan untuk membuat serta menerangkan laporan keuangan pemerintah daerah. Asas-asas SAP seperti landasan akuntansi, *Historical cost, Realization, Substance Over Form, Periodicity, Consistency, Full Disclosure*, dan *Fair Presentation*. Tujuan SAP adalah pedoman untuk membuat laporan keuangan terwujud atas tanggung jawab manifestasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengoptimalkan integritas, tanggung jawab serta kredibilitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Teknik pencatatan atau pengolahan akuntansi Pemerintah Daerah adalah suatu metode yang diciptakan untuk membantu pekerjaan administrator pemerintah daerah khususnya kabupaten sintang dalam mengalokasikan prosedur akuntansi secara maksimal. Dengan menggunakan sistem ini, proses dari pencatatan, perhitungan, dan pelaporan keuangan akan menjadi lebih mudah dan cepat. sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terdapat tiga metode pencatatan adalah single entry, double entry dan triple entry.

Pengikhtisaran merupakan salah satu sajian data informasi yang sudah tergolongkan di dalam realisasi wujud laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Wujud laporan keuangan bisa seperti neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal

penutup, sampai jurnal pembalik. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu wujud tanggungjawab pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pengolahan sumber daya keuangan pemerintahan. Pemberitahuan informasi data keuangan pemerintah daerah adalah tentang pemberitaan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan instansi – instansi dalam suatu wilayah pemerintahan daerah dan hasil uraian keuangan pemerintah daerah untuk pejabat pengelola keuangan daerah bertindak bagaikan konsolidator. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat serta negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kewajiban seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara proporsional (Vidyasari dan Suryono, 2021).

Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan tentang transparansi adalah asas integritas dan kredibilitas agar dapat mengizinkan rakyat daerah terkait untuk memahami maksud dari pernyataan tersebut secara keseluruhan dan lengkap serta jujur atas tanggung jawab dari pemerintah daerah atas pelaksanaan tata kelola seluruh sumber daya sesuai peryang mengacu kepada regulasi aturan absah berupa pengorganisasian laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010). Memberikan informasi keuangan yang transparansi dan kredibilitas kepada rakyat berdasarkan pertimbangan tentang rakyat juga memiliki hak mendapatkan pengetahuan tentang informasi keuangan yang transparansi dan kredibilitas secara menyeluruh atas tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten sintang dalam penggunaan semua sumber daya yang dikelola olehnya dan



relevan dengan ketaatannya pada regulasi aturan undang-undang yang berlaku.

Akuntansi Pemerintahan memiliki berbagai 3 tujuan yaitu pertanggung jawaban, managerial dan pengawasan (Hartati et al., 2020). Tujuan administratif pada akuntansi pemerintahan adalah untuk menyampaikan data keuangan guna tindak lanjut proses perancangan, penaksiran nilai, implemmentasi, monitoring, pengelolaan dana anggaran, perencanaan aturan regulasi, pengambilan ketetapan hasil, serta penaksiran rekomendasi hasil kapabilitas

pemerintah daerah kabupaten sintang merupakan hasil kerja nyata yang dapat menjadi landasan tercapainya akuntansi pemerintah daerah kabupaten sintang yang sukses. Tujuan inspeksi adalah untuk mendapati informasi yang diperlukan dari hasil akuntansi pemerintahan daerah untuk mensukseskan pemeriksaan laporan keuangan aparat pengawas dari BPK.

Berikut adalah data informasi opini laporan Keuangan pemda Kabupaten Sintang tahun 2013 – 2023 yang diberikan melalui BPK RI.

Tabel I: Opini LKPD Pemda Kabupaten Sintang 2013-2023.

Nomor	LKPD (Tahun)	Dilaporkan pada IHPS I	Dilaporkan pada IHPS II
1)	2013	WTP	WTP
2)	2014	WTP	WTP
3)	2015	WTP	WTP
4)	2016	WTP	WTP
5)	2017	WTP	WTP
6)	2018	WTP	WTP
7)	2019	WTP	WTP
8)	2020	WTP	WTP
9)	2021	WTP	WTP
10)	2022	WTP	WTP
11)	2023	WTP	WTP

Sumber: data BPK RI

Berasal tabel diatas bisa dicermati bahwa di tahun 2013 sampai 2023 pemda Kabupaten Sintang selalu menerima opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian ini menandakan pemda Kabupaten Sintang sudah menjaga peningkatan baik pada halnya publisitas informasi keuangan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen menyajikan informasi yang akurat untuk menciptakan budaya pemerintah yang terpercaya dan akuntabel (Arischa dan Frinaldi, 2023).

Dari pembahasan diatas, semoga pengaplikasian akuntansi pemerintahan sanggup mendirikan suatu hubungan timbal balik yang bagus atas kepercayaan antara pemerintah daerah Kabupaten Sintang dengan rakyat kota sintang melalui data informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan memakmurkan semua rakyat di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Analisis deskriptif merupakan gambaran dari hasil wawancara dengan

narasumber didalam merespons seluruh pernyataan yang diajukan oleh peneliti saat sesi wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap penerapan SAP di pemerintah daerah pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sintang. Analisis deskriptif menjelaskan tentang gambaran penerapan SAP di Pemerintah Kabupaten Sintang yang didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan pada saat sesi wawancara dengan Kabid Akuntansi pada BPKAD Pemkab Sintang.

Pada sesi wawancara narasumber menjawab, pengaplikasian standar akuntansi pemerintahan di Pemerintah daerah Kabupaten Sintang dimulai dengan kegiatan Pendataan, Penggolongan, dan Publisitas berhubungan dengan beragam jenis transaksi keuangan daerah yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sintang dalam mengalokasikan anggaran pemerintah daerah. Tentu saja efektifitas penggunaan SAP berbasis akrual tidak hanya terbatas pada kesiapan manusia namun juga kesiapan teknologi informasi yang akan digunakan (Lantu et al.,2023).

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang melakukan pengaplikasian proses akuntansi teknologi berbasis computer. Teknologi berbasis computer berguna dalam proses pengolahan data sehingga informasi yang dihasilkan berkualitas untuk pengambilan Keputusan (Maharani dan pravitasari, 2022). Teknologi tersebut yaitu SIMRAL yang berbasis web dan sudah menetapkan Bagan Akuntansi Standar (BAS) yang relevan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten

Sintang. Aplikasi SIMRAL membantu dalam penyusunan LKPD Kabupaten Sintang. Digitalisasi pemerintahan melalui implementasi SIMRAL dalam pembangunan daerah merupakan tujuan terbentuk nya SDMyang cerdas melayani (*smart e-government*), berkualitas unggul dan birokrasi pemerintahan yang baik dengan tata kelola daerah (Kurnia dan Suhartati, 2023). Operasi aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan (SIMRAL) adalah suatu wujud konfigurasi sistem elektronik pemerintahan yang penerapannya berupa pendayagunaan teknologi, data informasi serta sistem komunikasi bermaksud sebagai sarana meringankan suatu beban tanggung jawab pemerintah melalui program yang gampang untuk mengaksesnya, Ampuh dan responibilitas. *SIMRAL will have a positive impact on ASN performance and can provide benefits for ASN performance if it is easy to use* (Yuliati et al., 2024). Tujuan dari pelaksanaan SAP dengan baik serta sesuai ketentuan peraturan regulasi guna sebagai wujud tanggungjawab untuk pengguna informasi yang salah satunya adalah masyarakat melalui laporan keuangan pemerintah daerah oleh Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Keterbukaan informasi pemerintah daerah intens dilaksanakan karena berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban pengalokasian belanja modal serta tata kelola semua kemampuannya, baik dari segi terbatas berupa tenaga kerja dan modal, sedangkan yang tidak terbatas berupa listrik dan air. Proses pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya yang kompeten yang didukung latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman di bidang keuangan (Safiri dan Zulkarnain., 2020). Prinsip-prinsip akuntansi yang



digunakan untuk membuat dan melaporkan berbagai macam laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berdasarkan regulasi penerapan standar akuntansi pemerintahan. Hasil dari LKPD Kabupaten Sintang termuat dalam buku Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sintang.

Hasil wawancara menunjukkan tentang implementasi SAP di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah dilakukan secara benar dan relevan berdasarkan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sintang telah tepat tujuan dan signifikan atas aturan SAP dan regulasi kebijakan akuntansi lainnya. Dari hasil wawancara ini juga dapat diambil pendapat bahwa Kabupaten Sintang mempertahankan dan berupaya terus meningkatkan implikasi SAP di Kabupaten Sintang sehingga berpengaruh baik kepada catatan akhir laporan keuangan dan sudah sesuai dengan visi dan misi dari BPKAD Kabupaten Sintang.

Visi BPKAD Kabupaten Sintang yaitu terlaksana dan terpenuhinya penyelenggaraan dana keuangan serta aset pemerintah daerah kabupaten sintang yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan Misi dari BPKAD Kabupaten Sintang yaitu mewujudkan tata laksana dana kas daerah kabupaten dalam ikhtisar mengoptimalkan perolehan kas daerah dan berusaha memaksimalkan kapabilitas layanan publik. Akan tetapi menurut Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sintang, Bidang Akuntansi mengalami suatu kendala pada pelaksanaan pelaporan keuangan daerah yaitu keterlambatan dalam penyusunan

dan penyajian laporan berupa CALK, Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut masih dalam tahap manual.

Oleh karena perihal tersebut BPKAD Kabupaten Sintang, pada Bidang Akuntansi menggunakan kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh BPK-RI dan KEMENKEU RI untuk mengatasi kendala tersebut. Sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sukses dilaksanakan karena penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kabupaten sudah diterapkan dengan baik dan relevan atas ketentuan serta regulasi pemerintahan Kabupaten Sintang saat ini. Walaupun dalam implementasinya standar akuntansi pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Sintang dimulai dengan kegiatan Pendataan, Penggolongan, dan Publisitas berhubungan dengan beragam jenis transaksi keuangan daerah sudah dilakukan dengan baik tentu saja masih ada kendalanya. Kendala pada penyusunan informasi finansial khusus CALK masih manual, sehingga memerlukan *efort* dalam pencatatan informasi keuangan CALK yang dirancang untuk mendukung peraturan SAP di Kabupaten Sintang.

Walaupun terdapat kendala namun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari keuangan daerah ini menjadi salah satu indikator munculnya kriteria keberhasilan dari realisasi keuangan pemerintah daerah untuk pihak - pihak yang berkepentingan seperti, masyarakat, Inspektur, Pejabat Negara, DPRD Kabupaten Sintang dan lain-lain. Hal ini menjadi dasar Kabupaten Sintang selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Diraihnya opini wajar tanpa pengecualian menandakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah menjaga dan mempertahankan peningkatan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang baik serta berbanding lurus pada regulasi BPK RI dan KEMENKEU RI.



PENUTUP

Berlandaskan impresi Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sukses dilaksanakan karena penerapan SAP di Kabupaten Sintang telah diselenggarakan sesuai aturan dan regulasi lainnya yang berlaku saat ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Tercapainya opini wajar tanpa pengecualian menunjukkan dan menjelaskan tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah menjaga dan mempertahankan peningkatan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang baik serta relevan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta peraturan BPK RI dan KEMENKEU RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan:(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Se-Nusa Tenggara Barat). *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136-147.
- Arischa, K. L., & Frinaldi, A. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). *Tanah Pilih*, 3(1), 11-18.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Valuta*, 6(1), 41-54.
- Hartati, S., Hendri, E., & Lilianti, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 2(2), 167-185.
- Henukh, I. T., Saleh, M. F., & Adelina, Y. E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Kupang. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 161-184.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman (Survei pada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231-246.
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(1), 1-17.
- Kurnia, A. D., & Suhartati, T. (2023, October). ANALISIS SIMRAL PADA REKENING KAS UMUM DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* (Vol. 4, No. 1).
- Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 91-97.
- Maharani, S. S., & Pravitasari, D. D. (2022). Pengaruh Sumber Daya Manusia,



- Teknologi Informasi, Good Corporate Governance, Dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bmt Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 7(1), 113-122.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3094-3104.
- Safitri, E. N., & Zulkarnain, P. D. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 225-234.
- Susliyanti, E. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Yogyakarta Tahun 2019). *Jurnal Optimal*, 18(1), 101-116.
- Vidyasari, F. N. A., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Yuliati, E., Ramly, A. T., & Ayuniyyah, Q. (2024). Evaluation of SIMRAL with CIPP Model on the Performance of State Civil Apparatus (ASN): Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) Kota Bogor. *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*.
- Yulyanto, S., & Kiswanto, K. (2020). Determinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 7(2), 156-164.

